

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi ketenagakerjaan merupakan determinan yang sangat mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara. Penyerapan tenaga kerja cukup menggambarkan pengukuran kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyerapan tenaga kerja tahun 2013 cenderung moderat karena pertumbuhan ekonomi lebih besar ditopang sektor yang bukan padat karya, selain itu, tidak ada sinkronisasi antara permintaan tenaga kerja dan ketersediaan sumber daya manusia¹. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana memperkirakan pada tahun 2013 penyerapan tenaga kerja lewat pertumbuhan ekonomi akan menurun dibanding tahun 2011 dan 2012. Armida menyatakan terkait penurunan penyerapan tenaga kerja tersebut:

"Dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2013 itu dituliskan, elastisitas pekerja 350.000 orang per satu persen pertumbuhan ekonomi, tentunya itu sudah memperhitungkan perlambatan global yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia"².

Proyeksi elastisitas pekerja 2013 lebih rendah dibandingkan pada 2011 dan 2012. Pada 2011 dan 2012, menurut anggota KEN (Komite Ekonomi Nasional) Ninasapti Triaswati:

“target tahun ini, penyerapan per 1% pertumbuhan ekonomi akan mencapai 450.000 tenaga kerja, tren penurunan penyerapan tenaga kerja ini sangat mengkhawatirkan. Terlebih lagi, apabila membandingkannya

¹<http://www.indonesiainancetoday.com/read/42771/Penyerapan-Tenaga-Kerja-Tidak-Maksimal>(diakses tanggal 23 maret 2013)

²<http://id.berita.yahoo.com/bappenas-penyerapan-tenaga-kerja-turun-di-2013-160640612.html>
(diakses tanggal 23 maret 2013)

dengan kondisi tahun 2010 dan 2011. Tahun 2010, ekonomi tumbuh 6,1%, namun tenaga kerja yang diserap mencapai 500.000 orang. Sedangkan tahun 2011, ekonomi yang menanjak 6,5% menyerap 225.000 tenaga kerja per 1% pertumbuhan ekonomi, hal ini menunjukkan rendahnya angka elastisitas kesempatan kerja, angka elastisitas kesempatan kerja menyatakan hubungan antara persentase laju pertumbuhan kesempatan kerja dengan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2000-2004 yang nilainya di bawah 1”³.

Pemerintah menargetkan setiap 1,0 persen pertumbuhan ekonomi dapat menyerap 400.000-450.000 tenaga kerja. Hal ini disinyalir diakibatkan oleh pengaruh ekonomi global, sehingga pemerintah harus memotong proyeksi penyerapan tenaga kerja, saat ekspor melambat, pertumbuhan ekonomi akan tetap mengupayakan penciptaan kesempatan kerja yang fokus pada penguatan perekonomian domestik dan investasi. Selain itu, pengeluaran pemerintah diharapkan dapat mendorong perekonomian walaupun memiliki ruang fiskal yang terbatas.

Penyerapan tenaga kerja Indonesia secara langsung pada periode Triwulan I 2013 sebanyak 361.924 orang, penyerapan tertinggi oleh PMA, yaitu sebesar 213.403 orang (58,96% dari total tenaga kerja)⁴. Keberadaan investasi PMDN dan PMA diperkirakan akan dapat mengakibatkan efek ganda terhadap penyerapan tenaga kerja secara tidak langsung. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Chatib Basri mengatakan:

“Penyerapan tenaga kerja Indonesia pada triwulan tersebut terdiri dari proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebanyak 148.521 orang dan proyek Penanaman Modal Asing (PMA) sebanyak 213.403

³ <http://nasional.kontan.co.id/news/ken-penyerapan-tenaga-kerja-tahun-ini-jeblok> (diakses tanggal 23 maret 2013)

⁴ *Press release*, Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA Triwulan I Tahun 2013, Badan Koordinasi Penanaman modal Republik Indonesia

orang. Menurut Chatib, keberadaan investasi PMDN dan PMA diperkirakan akan dapat mengakibatkan efek ganda terhadap penyerapan tenaga kerja secara tidak langsung yaitu sebesar 4 kali”⁵.

Terkait PMDN, terjadi peningkatan realisasi investasi pada periode Triwulan I-2013 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2012 sebesar 39,6 persen, dari nilai realisasi investasi Rp19,7 triliun menjadi Rp27,5 triliun⁶.

Sedangkan realisasi investasi PMA pada periode Triwulan I-2013 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2012 juga meningkat sebesar 27,2 persen, dari nilai realisasi investasi Rp51,5 triliun menjadi Rp65,5 triliun. Kenaikan PMA ternyata dapat menyerap 213.403 orang atau 58,96 persen dari total tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja Indonesia secara langsung pada periode triwulan I tahun 2013 sebanyak 361.924 orang. Penyerapan tertinggi adalah kontribusi dari PMA, yaitu 213.403 orang atau mencapai 58,96 persen dari total tenaga kerja Indonesia.

Tabel I.1
Realisasi PMDN dan PMA pada Triwulan I tahun 2012 dan 2013

Investasi	Triwulan I 2012	Triwulan I 2013
PMDN	107.674	148.521
PMA	250.711	213.403
Total	358.385	361.924

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia

⁵http://www.depkeu.go.id/ind/Read/?type=ixNews&id=26579&thn=2013&name=br_230413_13.htm (diakses 23 april 2013)

⁶ *Ibid*

Pertumbuhan sektor industri dipengaruhi oleh investasi yang ditanamkan pada sektor tersebut. Tren investasi asing maupun investasi dalam negeri yang makin membaik diharapkan menghasilkan kontribusi yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Iklim investasi yang baik akan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk pertumbuhan sektor industri dan pada akhirnya akan berkontribusi pada penyediaan lapangan pekerjaan. Memperbaiki iklim investasi merupakan salah satu tonggak dari strategi pembangunan. Namun, industri yang bersifat padat modal membuat investasi yang ditanamkan cenderung dipergunakan untuk pembelian modal yang berupa mesin mesin canggih sehingga pada akhirnya industri tidak banyak menggunakan banyak tenaga kerja.

Penyerapan tenaga kerja juga tidak terlepas dari peranan pemerintah sebagai penyusun kebijakan yang mendukung terciptanya iklim investasi yang baik, standar penerimaan pendapatan untuk kesejahteraan tenaga kerja, serta strategi-strategi yang dilakukan demi tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Upaya untuk mengundang sebanyak mungkin investor asing mengimplikasikan dua strategi dasar yang secara tidak langsung memiskinkan buruh, salah satu kelompok yang terkena dampak tersebut adalah sektor industri manufaktur. Ada dua strategi dasar yang dilakukan pemerintah untuk mendukung kebijakan tersebut yaitu menjalankan politik upah murah dan menerapkan

kembali prinsip-prinsip liberal, fleksibel, terdesentralisasi dalam urusan ketenagakerjaan.⁷

Politik upah murah digunakan oleh BKPM untuk mengundang investasi, upah buruh yang murah dijadikan daya tarik.

“Mengutip Economic Intelligence Unit, brosur BKPM mencantumkan upah buruh Indonesia yang hanya USD 0.6 per jam dibandingkan dengan India (1.03), Filipina (1.04), Thailand (1.63), Cina (2.11) dan Malaysia (2.88). Menyertai angka-angka tersebut brosur promosi itu mencantumkan ‘labor cost is relatively low, even as compared to investment magnets China and India’ “⁸.

Upah murah akan membawa implikasi terhadap penurunan kinerja dan produktivitas buruh. Kondisi kerja yang buruk dan penurunan kesejahteraan hanya akan menghasilkan aksi-aksi protes buruh yang jelas akan membuat situasi investasi tidak nyaman dan hasil akhirnya justru akan membuat para investor berpikir ulang untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan upah minimum provinsi juga sering menjadi alasan bagi pengusaha untuk lebih memilih industri yang padat modal. Stabilitas perekonomian juga diperlukan untuk menjamin perekonomian berjalan dengan lancar. Kenaikan upah minimum yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir mengakibatkan pada pengurangan jumlah pekerja/buruh atau berkurangnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja. Kenaikan upah minimum dimaksudkan untuk penyesuaian daya beli terhadap kebutuhan hidup

⁷ <http://fspmptbi.org/politik-upah-murah> (diakses 26 April 2013)

⁸ <http://fspmptbi.org/politik-upah-murah> (diakses 26 April 2013)

pekerja/buruh dalam rangka mewujudkan ketenangan bekerja dengan tetap memperhatikan kelangsungan usaha⁹.

Jumlah pekerja di Indonesia mencapai 117 juta jiwa, dan merupakan yang terbesar di ASEAN. Dengan angka pengangguran 6,7% dari populasi 240.216.193 jiwa. Terkait dengan besaran nilai upah buruh di Indonesia, Fadli Zon mengatakan:

“Upah buruh di Indonesia merupakan yang paling rendah di antara negara-negara ASEAN. Thailand, misalnya, memiliki upah minimum buruh ekuivalen Rp 2,1 juta-Rp 2,8 juta per bulan, Malaysia Rp 2,4 juta, dan Filipina Rp 3 juta. Sementara di Indonesia, upah minimum buruh hampir seluruhnya di bawah Rp 2 juta”¹⁰.

Penelitian TURC menyebutkan pada 1997 upah minimum buruh mampu membeli 350 kg beras (dengan harga beras Rp700 rupiah per kilogram pada tahun itu), sedangkan upah minimum buruh 2008 hanya mampu untuk membeli beras sebanyak 160 kilogram beras (dengan asumsi harga berasRp 5.000 per kg di tahun ini). Ini bermakna upah riil buruh berkurang hampir 50 persen¹¹.

Penelitian INDOC juga menyatakan upah buruh Indonesia kini sangat rendah, hanya berkisar 5% sampai 6% dari biaya produksi. Data yang diperoleh dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyatakan upah buruh hanya menghabiskan 25 persen dari total komponen pengeluaran perusahaan. Yang 60 persen adalah biaya produksi, 15 persen lain uang siluman yang terus-menerus dilakukan oknum aparat pemerintah. Dalam hubungan industrial, kedudukan upah

⁹ http://menteri.depnakertrans.go.id/?show=news&news_id=943 (diakses tanggal 23 april 2013)

¹⁰ <http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2013/05/01/upah-buruh-di-indonesia-551995.html> (diakses tanggal 23 april 2013)

¹¹ <http://fspkep.kspsi.or.id/2009/06/buruh-dan-upah-minimum.html> (diakses 25 April 2013)

minimum merupakan persoalan prinsipil. Upah minimum harus dilihat sebagai bagian sistem pengupahan secara menyeluruh.

Perkembangan penyerapan tenaga kerja di Indonesia dapat dilihat dari jumlah penduduk yang bekerja di berbagai lapangan usaha. Ketut Kariyasa mengatakan bahwa:

“Adanya tingkat pertumbuhan ekonomi atau produksi yang tidak merata, dan sisi lain tidak diikuti oleh kemampuannya dalam penyerapan tenagakerja akan membawa konsekuensi terjadinya perubahan struktur dari ke dua aspek tersebut yang semakin menjauh baik antar sektor maupun antar subsektor pada masing-masing sektor”¹²

Sedangkan Swasono dan Sulistyaningsih mengatakan bahwa pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak disertai dengan perubahan struktur tenaga kerja yang berimbang¹³. Artinya laju pergeseran ekonomi sektoral relatif cepat dibandingkan dengan laju pergeseran tenaga kerja, sehingga titik balik untuk aktivitas ekonomi (*economic turning-point*) tercapai lebih dahulu dibanding dengan titik balik penggunaan tenagakerja (*labor turning-point*).

Besar *share*/kontribusi lapangan usaha terhadap total pembentukan PDRB baik atas dasar harga yang berlaku maupun harga konstan menggambarkan kemampuan daya saing sektor ekonomi perkenomian tersebut dibanding sektor-sektor ekonomi lainnya. Hill berpendapat bahwa proses perpindahan tenaga kerja

¹² Ketut Kariyasa, *Perubahan Struktur Ekonomi Dan Kesempatan Kerja Serta Kualitas Sumberdaya Manusia Di Indonesia*. Jurnal Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Bogor Hal. 7

¹³ *Ibid*, p.8

sangat lambat terutama bagi tenaga kerja yang berasal dari sektor dengan produktivitas rendah seperti sektor pertanian¹⁴.

Pembangunan di Indonesia pada dasarnya mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah peluang kerja dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembangunan yang dilaksanakan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi sektoral yang menggambarkan tingkat perubahan masing-masing sektor ekonomi yang terjadi¹⁵. Laju pertumbuhan ekonomi untuk skala nasional ditunjukkan oleh perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) sedangkan untuk skala regional ditunjukkan oleh perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PRDB). Secara umum perekonomian suatu negara terbagi menjadi 3 sektor utama, yaitu: sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Tabel I.2 menggambarkan perkembangan ketiga sektor tersebut pada tahun 1995-2001 di Indonesia.

Tabel I.2
Perkembangan Penyerapan Tenaga kerja masing-masing Sektor, Tahun 1995-2001

Tahun	Sektor (%)		
	Primer	Sekunder	Tersier
1995	47,0	18,1	34,9
1996	52,3	19,8	27,9
1997	50,6	20,0	29,4
1998	52,3	16,1	31,6

¹⁴ Hill, H. *Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak 1966: Sebuah Studi Kritis dan Komprehensif*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi, UGM, 1996.

¹⁵ Sri Kusreni, *Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Spesialisasi Sektoral Dan Wilayah Serta Struktur Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral Untuk Daerah Perkotaan Di Jawa Timur*. Majalah Ekonomi Tahun XIX, No. 1 April 2009. p.20

1999	50,4	17,2	32,4
2000	48,6	17,4	34,0
2001	43,8	17,5	38,7
Rata-rata	49,3	18,0	32,7

Sumber: Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik, diolah tahun 2013

Dari aspek kesempatan tenaga kerja, selama periode 1995-2001 terlihat bahwa sektor primer menampung hampir separuhnya (49,3%) dari total jumlah pekerja Indonesia, disusul oleh sektor tersier sekitar 33 persen, sedangkan sektor industri/sekunder baru hanya sekitar 18 persen. Selama periode 1995-2001, yang cukup menarik bahwa disamping dayaampungnya yang relatif paling rendah, pangsa penyerapan sektor sekunder terhadap tenagakerja juga cenderung menurun sekitar 0,09 persen terutama terjadi pada awal-awal krisis ekonomi, terlihat bahwa sektor sekunder pada periode tersebut mengalami penurunan sebesar 4%.

Tabel I.3
Komposisi Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Sektor dan Tipe daerah di Indonesia pada tahun 1980-1995

Komposisi Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Sektor dan Tipe daerah						
Sektor	Kota			Desa		
	1985	1990	1995	1985	1990	1995
Pertanian	9.16	10.13	8.84	67.86	67.2	60.29
Industri	14.44	17.97	17.16	7.31	8.65	10.13
Perdagangan	29.73	28.93	30.65	10.67	10.64	13.08
Jasa	34.02	27.07	26.94	8.98	7.45	8.22
Lain	12.65	15.9	16.41	5.18	6.06	8.28

Sumber : Badan Pusat Statistika, diolah penulis pada tahun 2013

Data pada tabel I.3 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan perkembangan penyerapan tenaga kerja antara desa dengan kota, sektor pertanian yang tergolong pada sektor primer lebih banyak menyerap tenaga kerja di desa, sedangkan di daerah perkotaan sektor pertanian sangat rendah menyerap tenaga kerja, daerah perkotaan banyak menyerap tenaga kerja pada sektor industri, perdagangan, dan jasa.

Perekonomian DKI Jakarta selama ini telah menjadi barometer bagi kemajuan dan kestabilan pembangunan nasional karena memiliki kondisi umum yang jauh lebih baik dibanding propinsi-provinsilain di Indonesia. Sebagai ibukota negara dan wilayah konsentrasi dari berbagai kegiatan perekonomian nasional dan internasional, Jakarta memiliki basis ekonomi yang lebih baik, karena didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang relatif baik, infrastruktur yang lebih memadai serta daya tarik investasi di sektor-sektor produktif yang melebihi propinsi-provinsilain.

Tabel I.4
Produk Domestik Regional Bruto DKI Jakarta Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha, Tahun 1980 dan 2011

Sektor	Tahun 1980		Tahun 2011	
	PDRB	Share	PDRB	Share
Sektor Primer	26.801	1,59	12.977.716	0,30
Pertanian	26.801	1.59	306.661	0.07
Pertambangan/Pengalihan	-		991.055	0.23
Sektor Sekunder	363.994	21,59	108.882.089	25.79
Industri Pengolahan	216.827	12,86	62.100.835	14.71

Listrik, Gas, Air Bersih	42.330	2,51	2.676.974	0.63
Bangunan	104.837	6,22	44.104.280	10.45
Sektor Tersier	1.295.633	76,82	312.057.406	73.9
Perdagangan, Hotel dan Restoran	740.583	43,91	92.345.063	21.87
Pengangkutan dan komunikasi	134.450	7,97	53.233.290	12.61
Keuangan, Real Estate, Jasa Perusahaan	373.650	22,16	117.190.316	27.75
Jasa-Jasa	46.950	2,78	49.288.737	11.67
JUMLAH	1.686.428	100	422.237.210	100

Sumber: BPS DKI Jakarta, Jakarta dalam Angka

Dari Tabel I.4 terlihat bahwa struktur perekonomian DKI Jakarta tersebut didominasi oleh tiga sektor utama, yakni sektor keuangan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor industri pengolahan. Selama periode tahun 1980 peranan sektor pertanian dalam pembentukan produk domestik regional bruto kecil, hanya sebesar 1,59% hal ini dikarenakan struktur wilayah DKI Jakarta tidak memiliki luas lahan pertanian, karena hanya ada pada titik-titik tertentu saja. Pada perkembangannya di tahun 2011, nilai *share*/kontribusi sektor pertanian menurun hingga menjadi 0,30% terhadap pembentukan PDRB DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan betapa semakin mengecilnya peranan sektor pertanian di DKI Jakarta.

Sedangkan industri pengolahan yang bersifat padat karya tersebut hanya menyumbang peranan sebesar 12,86% pada tahun 1980 dan tidak mengalami

perkembangan yang signifikan dalam pembentukan PDRB DKI Jakarta. Perkembangan yang signifikan ditunjukkan oleh sektor jasa yang mengalami kenaikan hampir 10% selama periode 1980 sampai dengan tahun 2011. Namun di sisi lain penurunan yang cukup signifikan terjadi pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Pada tahun 1980 rasio pembentukan sektor perdagangan terhadap PDRB DKI Jakarta sebesar 43,91% sebagai sektor yang paling dominan, sedangkan pada tahun 2011, peranannya hanya sebesar 21,87%.

Disadari bahwa perekonomian suatu wilayah dan kota akan mengalami perubahan dalam proses pembangunan, yaitu umumnya semakin tinggi tingkat pembangunan maka peranan sektor industri dan jasa akan semakin meningkat, sedangkan peranan sektor pertanian justru akan semakin menurun. Oleh karena itu diharapkan Pemerintah DKI Jakarta membangun DKI Jakarta berdasarkan pada potensi yang dimilikinya dengan memperhatikan aspek keunggulan kompetitif masing-masing sektor.

Dalam tabel I.4 akan ditampilkan proporsi penduduk DKI Jakarta yang bekerja menurut lapangan kerja utama yang menggambarkan proporsi penyerapan tenaga kerja selama periode 2008-2011.

Tabel I.5

Jumlah Penduduk DKI Jakarta Berumur 15 Tahun keatas yang bekerja menurut lapangan usaha utama Tahun 2008-2011 (jiwa)

No.	Lapangan Usaha Utama	2008	2009	2010	2011
1	Pertanian	19.668	25.464	28.477	30.404
2	Pertambangan dan Pengegalian	13.494	16.773	19.184	15.284
3	Industri Pengolahan	674.949	667.883	754.985	690.816
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	13.738	11.565	17.473	15.894
5	Konstruksi	178.668	190.992	191.493	163.033
6	Perdagangan	1.555.806	1.516.936	1.733.631	1.642.120
7	Angkutan dan Komunikasi	416.679	400.885	425.631	393.284
8	Keuangan	301.493	277.978	312.413	440.825
9	Jasa	1.017.471	1.009.914	1.206.474	1.196.758
	Jumlah	4.191.966	4.118.390	4.689.761	4.588.418

Sumber : BPS, Jakarta Dalam Angka

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa struktur penyerapan tenaga kerja pada periode 2008 sampai dengan 2011 didominasi oleh sektor perdagangan dengan persentase rata-rata 35% terhadap total seluruh angkatan kerja di DKI Jakarta, lalu di ikuti oleh sektor jasa, dengan hal tersebut semakin menonjolkan predikat DKI Jakarta sebagai Kota Jasa (*Service city*) , kemudian diikuti oleh sektor industri pengolahan yang mengalami penurunan angkatan kerja sebesar 8,49%, namun disisi lain jumlah angkatan kerja yang bekerja pada sektor jasa keuangan, real estate dan jasa perusahaan meningkat sebesar 41%, hal ini

mengindikasikan bahwa semakin terjadinya pergeseran struktur perekonomian ke arah struktur ekonomi modern atau sektor ekonomi tersier yang meliputi sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Perdagangan dan Komunikasi, Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan, serta Jasa.

Kondisi tersebut menyimpulkan bahwa seiring dengan meningkatnya output atau Produk Domestik Regional Bruto pada sektor primer (pertanian dan pertambangan) akan semakin meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut. Meskipun jika dilihat dari sisi pembentukan PDRB, kontribusinya semakin menurun, namun dalam sisi penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan.

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi DKI Jakarta yang lebih kecil dari pada kontribusi sektor industri dan jasa serta semakin kecilnya kontribusi sektor pertanian menegaskan bahwa sektor tersebut memiliki peranan yang kecil di Provinsi DKI Jakarta. Namun permasalahan yang timbul adalah tidak adanya pemerataan penyerapan tenaga kerja. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan terjadinya ketimpangan pendapatan antar tenaga kerja tersebut. Kemampuan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam masalah penyerapan tenaga kerja dan kontribusinya terhadap perekonomian dapat mengamati perkembangan-pertumbuhan sektor ekonomi dan penyerapan tenaga kerja dari tahun ke tahun.

Dari faktor-faktor yang dijelaskan di atas peneliti tertarik untuk mengetahui dan meneliti secara lebih mendalam antara PDRB Sektoral (primer, sekunder, tersier) terhadap Penyerapan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta. Karena masalah penyerapan tenaga kerja dan kontribusinya terhadap

perekonomian berkaitan erat dengan strategi perencanaan dan peningkatan pembangunan daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, sebagai berikut:

1. Angka elastisitas kesempatan kerja
2. Investasi PMDN dan PMA
3. Upah minimum
4. Pergeseran struktur ekonomi
5. PDRB Sektoral

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang peneliti sebutkan, masalah penyerapan tenaga kerja merupakan masalah yang kompleks dan luas cakupannya, dikarenakan keterbatasan peneliti pada waktu dan tempat untuk pemecahan masalah tersebut, maka peneliti hanya membatasi permasalahan yang diteliti hanya pada masalah:

1. Pengaruh PDRB Sektoral (primer, sekunder, dan tersier) Terhadap Penyerapan Tenaga kerja.
2. Analisa Deskriptif Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi DKI Jakarta Menggunakan Analisis *Shift-Share*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Apakah terdapat pengaruh antara PDRB sektoral terhadap penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta tahun 1980-2011?”

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini bertujuan untuk menguji relevansi teori-teori ekonomi pembangunan yang dikemukakan untuk menguji sebuah masalah ketenagakerjaan dalam sebuah perekonomian. Kemudian juga untuk dijadikan bahan acuan dan sarana pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai masalah penyerapan tenaga kerja yang dipengaruhi oleh pergeseran struktur ekonomi, untuk kemudian dibandingkan serta di analisis hasil penelitian tersebut sehingga menjadikan hasil penelitian tersebut menjadi sebuah pemikiran yang ilmiah.

2. Kegunaan Praktis

Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai acuan peningkatan efektifitas penanganan masalah ketenagakerjaan di DKI Jakarta sehingga dapat mengalokasikan sumber daya ekonomi dengan lebih efisien, tercipta stabilitas sosial ekonomi bagi masyarakat.